SANG PENIPU BERTOPENG PAHLAWAN

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

PKS Memberangus Demokrasi

Kebebasaan menyampaikan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Jika kebebasan berpendapat dibungkam, maka demokrasi akan mati. Inilah yang dilakukan PKS di balik topeng-topeng pahlawan palsunya.

PKS punya doktrin Al Qiyadah wal Jundiyah: Hasilnya tak ada itnteraksi demokratis dalam PKS. Yang terjadi hanya ada instruksi komandan kepada para prajurit layaknya tentara.

PKS juga punya doktrin Tsiqoh (percaya). Ini bagian rukun ke -10 dalam Arkanul Bai'ah Ikwanul Muslimin. Apapun kata pimpinan partai wajib untuk dipercayai para kader. Ini mirip doktrin Hitler saat berkuasa !!

Jika kader berani menyoal instruksi pimpinan partai, maka akan kena hukuman (iqob) yang ditentukan Naqib atau Murobbi. Di depan publik PKS mengaku demokratis, tapi faktanya jadi pembunuh demokrasi.

Ironinya, di balik topeng agamanya, PKS menghalalkan penipuan atau memutar balik fakta. Contohnya, saat Lutfi Hasan Ishaq ditangkap KPK karena korupsi, ada doktrin di Rembang bahwa yang ditangkap hanya orang mirip LHI dan para kader wajib percaya. Ini sungguh mengerikan.

Di hadapan para anggota baru (Tamhidi), ketaatan membabi buta tak begitu kentara karena PKS menyembunyikan wajah aslinya. Kepada publik pasang tampang manis, tapi dalam partainya jadi sadis !

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

PKS Memberangus Demokrasi

Kebebasaan berpendapat adalah bagian demokrasi, tapi PKS membungkam demokrasi dengan doktrin.

Ada doktrin Al Qiyadah wal Jundiyah di PKS: Instruksi pimpinan partai wajib ditaati dan tak bisa dibantah.

Ada doktrin Tsikoh di PKS: Apapun kata pimpinan partai wajib dipercaya, tak peduli bohong atau tidak.

Jika kader PKS membantah instruksi partai akan kena hukuman (iqob) yang ditentukan Naqib atau Murobbi.

PKS halalkan segala cara, bohong atau putar balik fakta. Contoh, saat LHI ditangkap KPK, kader PKS Rembang didoktrin bahwa yang ditangkap hanya orang mirip LHI.

PKS sembunyikan wajah aslinya. Mengaku demokratis hanya untuk tarik simpati, tapi aslinya anti demokrasi.

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Cara PKS Bangun Khilafah di Indonsia

Buku yang wajib dibaca para kader PKS adalah Majmuatu Rasail karya Hasan Al Banna. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada 1997 berjudul 'Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin" (RPIM) yang diterbitkan Era Intermedia di Solo.

مجموعة الرسائل
RISALAH PERGERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN

Dalam RPIM jilid 1 halaman 258 disebutkan, "Ikhwanul Muslimin menjadikan fikrah tentang khilafah dan upaya untuk mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam manhaj-nya.

Dalam RPIM jilid 1 halaman 207 terdapat cita-cita mendirikan sebuah Daulah Islamiyah yang merdeka untuk menerapkan hukum Islam, merealisasikan sistem sosialnya, mendeklarasi-kan prinsip-prinsipnya dan menyampaikan dakwahnya kepada seluruh manusia. Selama Daulah Islamiyah belum tegak, maka seluruh kaum muslimin dinilai berdosa.

Untuk membumikan cita-cita PKS menegakkan khilafah di Indonesia ada beberapa langkah yang dijalankan, yakni:

1. Buku RPIM wajib dibaca kader inti PKS dalam pertemuan rutin tiap pekan. Dibaca secara bergiliran dalam kelompok kecil dan mengadakan bedah buku RPIM secara berkala.
2. Buku RPIM juga dibaca bergiliran dalam kelompok kecil berisi kader inti PKS (dinamakan USAR) yang dipimpin oleh Naqib untuk laki-laki dan Naqibah untuk wanita.
3. Bagi anggota baru PKS belum diwajibkan membaca buku RPIM karena dikhawatirkan bisa menimbulkan kecurigaan. Beda dengan KADER INTI yang sudah teruji loyalitasnya.

Jelas sekali bahwa PKS bercita-cita tegaknya khilafah. Tapi mereka takut mencantumkannya dalam dokumen resmi partai Beda dengan Hizbut Tahrir yang mendeklarasikan tegaknya khilafah secara terang-terangan.

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Nasionalisme PKS dan Bendera Dibalik

PKS adalah bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Hilmi Aminuddin ditunjuk menjadi Muraqib Aam di Indonesia.

Bagi PKS, mengenali sejarah perjuangan Mesir jauh lebih penting dari mengenali sejarah perjuangan Indonesia. Ini sesuai isi buku Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin karya Hasan Al Banna jilid 1 halaman 83 bahwa batas negeri Islam terlepas dari sekat-sekat geografis dan apa yang disebut sebagai tanah tumpah darah.

Dalam 10 Muwashofat Kader PKS tidak ada satupun yang menyinggung pentingnya nasionalisme dan pembelaan negara Indonesia. Sebab, Indonesia hanya mau dijadikan batu loncatan dari gerakan transnasional demi penegakan khilafah di Indonesia dan negara lain.

PKS asing dengan buku karangan tokoh pejuang dan ulama Indonesia seperti Quraisy Shihab, Natsir, HAMKA dll. Tapi mereka lebih kenal buku-buku tokoh Mesir semisal Hasan Al Banna, Sayyid Qutb, Said Hawwa, Fathy Yakan.

PKS lebih mengenal tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Abdullah Azzam di Afghanistan atau Sayyid Qutb sebagai pejuang Mesir. Tapi PKS malah ingin melupakan Kartini, Bung Tomo, Jendral Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta dll.

PKS tidak mau mengenal sejarah Islam di Indonesia seperti ditunjukkan Ahmad Dahlan yang berjuang di Muhammadiyah maupun Hasyim Asy'ari yang berjuang di NU.

Dengan doktrin transnasional, PKS mengikis nasionalisme kebangsaan Indonesia. Wajar saja bila kader PKS tak hormat pada simbol negara Indonesia. Bahkan, bendera merah putih dipasang terbalik di kantor PKS Situbondo pada 4/8/2017.

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Sayap Militer dan Intelejen PKS

Sebagai tangan panjang Jamaah Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir di Indonesia, model gerakan PKS juga mengadopsi IM di Mesir, termasuk dalam pengelolaan pelatihan ala militer maupun intelejen.

Langkah PKS mirip perwakilan IM di Palestina Haroqah Al Muqowwamah Al Islamiyah (HAMAS) yang membentuk sayap militer bernama Brigade Izzudin Al Qossam. Sayap militer ini mirip pasukan khusus dan keanggotaannya direkrut sangat rahasia hingga anggota keluarganya tidak ada yang tahu.

PKS mengajarkan militerime melalui Pandu Keadilan. Jika lolos dari Pandu Keadilan, kader PKS akan menjadi anggota (Korps Satuan Tugas Keadilan) KORSAD bagi laki–laki dan Barisan Putri Keadilan (SANTIKA) bagi perempuan. Mereka diajarkan beladiri, Thifan Po Kan, salah satu aliran kungfu.

Para kader PKS juga dikirim berlatih bersama dengan para kader Ikhwanul Muslimin beberapa negara dalam bentuk Mukhoyyam. Materi yang diajarkan beragam dari strategi militer hingga cara menggunakan senjata api.

Para Mudarib (mentor) kegiatan Mukhoyyam adalah para alumni medan jihad di seluruh dunia, terutama alumni Jihad Afghanistan dan Palestina. Perlu dicatat, mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq adalah veteran perang Afghanistan.

Yang tak pernah dipublikasikan pers, PKS diam-diam pernah mengirim relawan perang ke Poso dan daerah konflik lainnya. Mereka cukup terlatih dan terdapat veteran Afghanistan. Saat masuk daerah konflik mereka diturunkan di tengah laut dan berenang senyap ke pantai untuk menghindari blokade TNI.

Pada masa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) pernah dibentuk sayap intelejen secara rahasia. Proses rekrutmen intelejen diisi para praktisi hasil didikan Soeripto, legenda intelejen Indonesia yang berkhidmat kepada PKS. Tokoh PKS yang sering berinteraksi dengan dunia militer dan intelejen antara lain Luthfi Hasan Ishaaq, Abdul Kharis Al Masyhari (Ketua Komisi I DPR RI), Asep Saefullah Danu (Ketua Kepan-duan DPP PKS).

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Korupsi Terstruktur PKS

Label PKS sebagai partai dakwah hanya topeng pemanis saja karena proses penghimpunan dana PKS ditempuh dengan menghalalkan segala cara.

Setiap peristiwa politik dikapitalisasi menjadi sumber uang untuk menambah saldo rekening partai. Salah satunya dilakukan oleh TOMDA (Tim Optimalisasi Musyarokah Daerah) yang terdapat dalam struktur PKS tiap daerah.

Dalam Pilkada, TOMDA bertugas mengelola penentuan calon kepala daerah, partai koalisi pendukung, berapa mahar politik yang harus dibayar kepada PKS. Prosesnya ditentukan oleh TOMDA yang dikoordinasikan dengan DPP PKS.

Kesamaan ideologis partai bukan jadi syarat penentu dalam Pilkada PKS. Semua proses hanya bergantung dengan urusan uang. Yang penting, tentukan dulu maharnya, permainan isu akan datang kemudian.

Jika calon lawan Pilkada non-muslim, PKS akan memainkan isu agama. Sebaliknya, jika calon PKS non-muslim, maka akan disiapkan berbagai cara membela diri. Disebut partai tak konsisten tak jadi masalah. Yang penting, uang mengalir jauh.

Bila pilkada selesai dan calonnya menang, operasi cari uang PKS digantikan oleh Tim Fundraising Daerah (TFD). Tim yang ada di tiap daerah ini bertugas mengeksplorasi berbagai pos anggaran (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD yang bisa dimanfaatkan oleh PKS melalui projek pengadaan barang, jasa atau yang lainnya.

Tak hanya itu, TFD dan bendahara partai juga memotong dana aspirasi Anggota Legislatif PKS dengan dalih sebagai infaq. Begitulah korupsi sistemik PKS yang dilakukan terstruktur tanpa peduli lagi pada ideologi atau ajaran agamanya.

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Doa Robithoh : Bukti PKS Kultuskan Hasan Al Banna

Doa Robithoh tak terdapat dalam tuntunan Qur'an ataupun hadits. Anehnya, doa ini diwajibkan bagi para kader PKS di semua jenjang keanggotaan.

Doa Robithoh sebenarnya hanya karya Hasan Al Banna (pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir). Tapi doktrin PKS mewajib para kader harus membacanya tiap hari.

PKS sering menyindir NU dan Muhammadiyah karena dinilai mengkultuskan tokoh. Tapi PKS sendiri justru mengkultuskan Hasan Al Banna lewat doa Robithoh.

Membaca doa berdasar tuntutan syariat adalah sunah. Tapi mewajibkan membaca doa Robithoh yang tak ada dalam tuntunan hadist atau Qur'an, adalah bid'ah yang harus dihindari oleh umat Islam.

Awas ! Jangan mau ditipu topeng berwajah agamis

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Engkong, Sang Godfather PKS

Nama Hilmi Aminuddin (Engkong Hilmi) sangat dihormati kader PKS. Engkong digambarkan sosok tawadlu, pintar berdakwah, militan dan hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk dakwah dan jamaah.

Anehnya, kader PKS banyak yang tak tahu siapa nama sebenarnya Engkong Hilmi. Sebab, sejak era Tarbiyah jati dirinya sengaja dirahasikan dengan alasan amniyah, yakni demi keamanan.

Padahal, Engkong Hilmi adalah anak Danu Muhammad Hasan, panglima pemberontak DI/TII wilayah Indramayu. Saat PKS meraih 45 kursi DPR pada pemilu 2004, jati diri Engkong Hilmi baru mulai dibuka kepada publik.

Sejak itu, Hilmi Aminuddin mulai diperlihatkan mengisi taujih–taujih (arahan) di level DPW PKS se-Indonesia. Engkong dahulunya miskin, kekayaannya bisa melonjak drastis pasca pemilu 2004.

Engkong pernah menjabat ketua Majelis Syuro PKS, lalu diganti oleh Salim Segaf Al Jufri. Meski jabatannya diganti, kekuasaan Engkong tetap menggurita di PKS layaknya seorang Godfather.

Sejatinya, Hilmi sendiri adalah pemberontak NII yang pernah ditangkap pada 1980. Tapi doktrin dan topeng PKS rupanya bisa menyulapnya bagai pahlawan.

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Kader PKS Hanya Jadi Korban Syahwat Politik

Dengan slogan *"Sunduquna juyubuna"* (uang kami berasal dari kantong–kantong kami), PKS mewajibkan anggotanya membayar iuran tiap bulan untuk mendanai pemilu.

Sayangnya, uang hasil iuran itu jusru tak bisa dinikmati oleh para kader di tingkat bawah karena semuanya dipakai untuk pemenangan para calon legislatif (caleg) "mahkota" PKS.

Anehya, caleg PKS dari luar tidak dibantu dana hasil iuran anggota PKS, tapi disuruh mencari dana sendiri. Lebih aneh lagi, perolehan suara caleg dari luar tak akan mungkin bisa melebihi "Caleg Mahkota" PKS.

Pengeluaran caleg DPR RI PKS tak besar. Contoh DAPIL 3 Jawa Tengah Pemilu 2014 (Grobogan,Blora,Pati, Rembang). Total biaya subsidi kampanye caleg Rp. 200 juta. Sedang biaya saksi diambilkan dari dana iuran kader selama 5 tahun. Sehingga caleg DPR RI tidak mengeluarkan dana untuk saksi.

Gaji anggota DPR RI 2014–2019 Rp. 797.928.000 setahun. Sedang gaji anggota DPR PKS dipotong Rp. 325,000,000 per tahun. sehingga ada sisa Rp. 472,000,000. Jadi, operasional kampenya pemilu sudah bisa ditutup dari gaji tahun pertama.

Celakanya, pengelolaan dana PKS tak transparan. Sehingga kader tak sadar bila selama ini hanya diperalat elit PKS lewat iuran rutin yang hasilnya dipakai memenuhi syahwat politik para elitnya. Makanya, demi keamanan, bendahara PKS tak pernah diganti, baik di daerah maupun di pusat Jakarta.

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Kader Akar Rumput PKS Bergejolak

Metode kaderisasi PKS mirip sistem Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir. PKS masuk melalui sel-sel forum kecil yang biasa disebut Liqo atau Usroh atau Usar.

Sistem ini menghasilkan senioritas di tubuh PKS. Hal ini bisa dilihat nama-nama pemain utama yang tak bergeser dalam 2-3 periode di parlemen seperti Hidayat Nurwahid dll.

Sehingga, PKS hanya dikendalikan oleh orang itu-itu saja. Kader baru dari lingkaran berbeda akan sulit memegang kendali partai. Fenomena ini terjadi di pusat hingga daerah.

Kaderisasi PKS hanya dijadikan mesin pendulang suara dan tak ada regenarasi. Jabatan politik tak akan diberikan pada kader baru. Dinasti politik atau raja-raja kecil pun muncul.

Senioritas dalam PKS berpengaruh pada kampanye pemilu. Para caleg DPR tak pernah berbagi biaya kampanye dengan caleg DPRD, tapi hanya mendompleng dan biaya kampanye dibebankan caleg DPRD.

Ketika caleg DPR terpilih dan reses berkeliling ke dapilnya, hanya tutup mata dan hati pada kader daerah yang telah berdarah-darah mengeluarkan biaya. Wajar, bila kader PKS daerah kini banyak yang menjerit dalam hati.

Celakanya, saat reses, anggota DPR datang bak ustadz yang harus didengar petuahnya. Demokrasi dimatikan, kader PKS dipaksa dengar arahan dan dilarang mengritik. Dampaknya, kader akar rumput PKS akhirnya kini mulai bergejolak.

Hilangnya Aksi-aksi Sosial PKS

Dulu, PK/PKS jadi partai terdepan dalam aksi-aksi sosial seperti siaga bencana, bhkati sosial dll. Jargon peduli diolah jadi icon (brand) untuk menarik perhatian yang dapat dipakai sebagai alat pendongkrak suara saat pemilu.

Lain dulu, lain sekarang. Aksi kepedulian PKS itu kini sudah pudar. Lunturnya aksi-aksi kepedulian PKS tersebut terjadi sejak diberlakukan Peraturan Pemilu soal pembagian daerah pilihan (Dapil) dan adanya perolehan suara terbanyak.

Karena ada persaingan perolehan suara terbanyak di dapil, aktivitas PKS kini hanya berisi manuver caleg untuk merebut simpati publik di dapilnya. Caleg PKS tak peduli lagi pada persoalan di luar dapilnya. Maklum, mereka harus hemat.

Persaingan caleg tak hanya terjadi lintas parpol, tapi juga terjadi persaingan antar caleg di internal PKS. Sehingga sesama caleg PKS kini saling berebut suara. Kader PKS jadi terkotak-kotak hingga aksi sosial tak bisa dijalankan lagi.

Aksi sosial dinilai tak menguntungkan caleg PKS lagi. Selain perlu biaya besar, perolehan suaranya bisa menyebar kepada caleg PKS lainnya. Padahal, antar caleg PKS ada persaingan meraih suara terbanyak di dapil. Untuk itu jangan heran, bila caleg PKS kini malas menggelar aksi-aksi sosial.

Namun PKS punya "mesin" pengeruk suara lain, yakni dakwah keagamaan. Sejak awal, dakwah agama dipakai PKS sebagai alat pengeruk suara pemilu. Artinya, agama dan aksi sosial sama-sama hanya jadi lipstik politik. Jadi jangan kaget, bila ketulusan jadi hal langka dalam dakwah agama PKS.

Di luar itu, elit PKS ternyata "menghalalkan" money politic. Sehingga para caleg PKS pilih jalan pintas pragmatis: "Buat apa susah-susah mengadakan aksi sosial, jika pemilih bisa dibeli dengan uang?"

Hilangnya Aksi-aksi Sosial PKS

Dulu, PK/PKS jadi partai terdepan dalam aksi-aksi sosial seperti siaga bencana, bhkati sosial dll. Jargon peduli diolah jadi icon (brand) untuk menarik perhatian yang dapat dipakai sebagai alat pendongkrak suara saat pemilu.

Lain dulu, lain sekarang. Aksi kepedulian PKS itu kini sudah pudar. Lunturnya aksi-aksi kepedulian PKS tersebut terjadi sejak diberlakukan Peraturan Pemilu soal pembagian daerah pilihan (Dapil) dan adanya perolehan suara terbanyak.

Karena ada persaingan perolehan suara terbanyak di dapil, aktivitas PKS kini hanya berisi manuver caleg untuk merebut simpati publik di dapilnya. Caleg PKS tak peduli lagi pada persoalan di luar dapilnya. Maklum, mereka harus hemat.

Persaingan caleg tak hanya terjadi lintas parpol, tapi juga terjadi persaingan antar caleg di internal PKS. Sehingga sesama caleg PKS kini saling berebut suara. Kader PKS jadi terkotak-kotak hingga aksi sosial tak bisa dijalankan lagi.

Aksi sosial dinilai tak menguntungkan caleg PKS lagi. Selain perlu biaya besar, perolehan suaranya bisa menyebar kepada caleg PKS lainnya. Padahal, antar caleg PKS ada persaingan meraih suara terbanyak di dapil. Untuk itu jangan heran, bila caleg PKS kini malas menggelar aksi-aksi sosial.

Namun PKS punya "mesin" pengeruk suara lain, yakni dakwah keagamaan. Sejak awal, dakwah agama dipakai PKS sebagai alat pengeruk suara pemilu. Artinya, agama dan aksi sosial sama-sama hanya jadi lipstik politik. Jadi jangan kaget, bila ketulusan jadi hal langka dalam dakwah agama PKS.

Di luar itu, elit PKS ternyata "menghalalkan" money politic. Sehingga para caleg PKS pilih jalan pintas pragmatis: "Buat apa susah-susah mengadakan aksi sosial, jika pemilih bisa dibeli dengan uang?"

Sang Penipu Bertopeng Pahlawan

Jika PKS Berkuasa, Ini yang Terjadi

Semboyan Al-Hizbu huwal-Jama'ah, wal-Jama'ah hiyal-Hizb' yang dideklarasikan 9 Agustus 1998, jadi garis perjuangan Jamaah Tarbiyah Indonesia. Semua visi misi, tujuan, program, amal dan struktur Jamaah Tarbiyah kini diemban oleh PKS. Misi jamaah jadi misi partai, kerja jamaah jadi kerja partai, demikian pula program dan strukturnya.

Sebagai metamorfosis Jamaah Tarbiyah, PKS akan memperjuangkan cita–cita Ikhwanul Muslimin di Mesir. Jadi, PKS seperti cabang IM di Indonesia yang dipimpin oleh Muraqib 'Aam di bawah kendali Hilmi Aminuddin.

Sedikitnya 8 poin perubahan akan terjadi di Indonesia jika PKS menang pemilu. Rencana perubahan itu terjabar dalam buku wajib PKS, *Majmuatu Rasail Ikhwanul Muslimin* karya Hasan Al Banna yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin" (RPIM).

Ini 8 poin perubahan bila PKS berkuasa di Indonesia

1. NKRI BERUBAH JADI KHILAFAH: Hal ini terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 207. PKS maudirikan Daulah Islamiyah.
2. PARTAI POLITIK DIBUBARKAN: Hal ini terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 311. Semua partai dibubarkan, kecuali PKS
3. PERTUKARAN PELAJAR LUAR NEGERI DILARANG: Hal ini terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 204.
4. WANITA DILARANG BEKERJA: Hal ini terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 60. Wanita urus rumah dan didik anak saja.
5. MEMUJA ARAB: Hal ini terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 45. Bangsa Arab dinilai istimewa dari bangsa lain.
6. FILM & LAGU DIKONTROL KETAT: Hal ini terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 120. Pentas dan bioskop dikontrol ketat.
7. OPERASIONAL WARUNG DIBATASI: Hal ini terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 120. Kegiatan warung diawasi ketat.
8. WESTERNISASI DILARANG: Terdapat pada buku RPIM jilid 1 hal 121. Segala gaya hidup kebarat–baratan dilarang.

Karena belum berkuasa, PKS masih merahasiakan cita–cita Khilafah Islamiyah dengan topeng. Tapi bau busuk syahwat politiknya yang menghalalkan segala cara kini mulai tercium tak sedap dan melahirkan kekecewaan para kadernya.